

Analisis Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)

M. Finsa Bagus Prastantio

M. G. Wi Endang N. P.

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya

Malang

Email: m.finsabagusprastantio@gmail.com

Abstract

The aim of this study was to determine how well the application made to the corporate governance at PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Palembang in improving the company's performance in the period 2007-2012. The method used in this study is a qualitative research method through a descriptive approach that takes the location of research at PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Branch Palembang. Source of data used are primary data and secondary data. Analysis on Good Corporate Governance conducted by SK-16/S.MBU/2012 and analysis of the company's performance using the profitability ratio. The analysis results of the implementation of good corporate governance and the company's financial ratio analysis showed that the implementation of corporate governance at PT Pelabuhan Indonesia II has been quite well which helps in improving the company's performance.

Keyword: *Good Corporate Governance, SK-16/S.MBU/2012, Profitability Ratio*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa baik penerapan yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang dalam meningkatkan kinerja perusahaan pada periode 2007-2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif yang mengambil lokasi penelitian di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Analisis terhadap Tata Kelola Perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan Surat Keputusan tahun 2012 tentang GCG dari menteri dan analisis kinerja perusahaan digunakan rasio profitabilitas. Hasil dari analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan analisis rasio keuangan perusahaan menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia II telah cukup baik yang membantu dalam peningkatan kinerja perusahaan.

Kata Kunci: **Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Rasio Profitabilitas**

I. PENDAHULUAN

Perekonomian adalah suatu bentuk sistem yang memiliki fungsi dalam mengatur serta menjalin kerjasama pada bidang perekonomian, dilakukan melalui hubungan antar manusia maupun antar lembaga yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan berdasarkan falsafah, ideologi, serta tradisi masyarakat yang berkembang secara turun-temurun di suatu tempat. Indonesia sendiri pernah menggunakan dua sistem perokonomian antara lain sistem perekonomian kerakyatan dan sistem perekonomian demokrasi. Sistem ekonomi kerakyatan awal mulanya diciptakan melalui hubungan kerjasama antara rakyat dan pemerintah. Rakyat disini memiliki peranan utama dalam

kegiatan ekonomi, sedangkan pihak pemerintah memegang peranan dalam menciptakan suasana perekonomian yang nyaman demi menunjang kelangsungan usaha. Sistem ekonomi demokrasi bila dibandingkan dengan sistem ekonomi kerakyatan memiliki sedikit kemiripan, namun yang membedakannya adalah peran pemerintah yang tidak terlalu dominan. Peran pemerintah pada sistem perekonomian ini berupa penguasaan cabang-cabang produksi penting, melakukan pengarahan dan bimbingan kepada rakyat untuk bertindak bijaksana dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya yang tersedia. Memasuki sekitar tahun 1990-an, Indonesia diterpa masalah

krisis yang berkepanjangan yang berujung pada terjadinya pergolakan dari berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah yang menyuarakan tuntutan terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Tuntutan penerapan prinsip GCG terhadap seluruh perusahaan di Indonesia tersebut dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia tidak tertekan oleh perusahaan-perusahaan asing dan persaingan global yang semakin berat.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan penyumbang terbesar dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, tidak luput bahkan sering menjadi sorotan dari masyarakat maupun media dan mendapat berbagai bentuk kritikan atas kinerja perusahaan BUMN selama ini. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak pada penyedia layanan jasa kepelabuhan di Indonesia. Mendapatkan keuntungan merupakan tujuan utama dari setiap perusahaan termasuk PT. Pelabuhan Indonesia, dan hal tersebut tidak akan lepas dari masalah-masalah yang akan datang dan menghalangi perusahaan dalam mencapai tujuan mereka. Salah satu masalah yang mungkin akan dialami perusahaan adalah buruknya pengelolaan didalam perusahaan dan tidak berfungsinya sistem perencanaan dan pengendalian internal yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Good Corporate Governance untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang)”**.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian *Good Corporate Governance*

Menurut Cadbury seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi (2011:1) *Good Corporate Governance* adalah “mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar tercapai kesinambungan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan”.

B. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip-prinsip pokok *Good Corporate Governance* yang perlu diperhatikan supaya terwujudnya praktik *Good Corporate Governance* yang baik adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut sangat diperlukan untuk mencapai kinerja yang

berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (Adrian Sutedi, 2011).

1. Transparency

Ialah pengungkapan pada setiap kebijakan atau aturan yang akan digunakan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara adil, akurat dan tepat waktu. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan untuk mewujudkan prinsip transparansi ini, yaitu:

- a. Mengembangkan sistem akuntansi berbasis standar akuntansi yang diterima secara umum yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.
- b. Mengembangkan teknologi informasi (*information technology*) dan sistem informasi manajemen (*management information system*) dalam menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif dari pihak komisaris dan manajer.
- c. Mengembangkan manajemen risiko korporasi (*enterprise risk management*) untuk memastikan bahwa semua risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada tingkat yang jelas.
- d. Mengumumkan adanya jabatan kosong agar setiap pihak mengetahuinya. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pengangkatan pejabat perusahaan dengan cara yang kolutif atau nepotisme.

2. Accountability

Akuntabilitas adalah kejelasan dari fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan dalam mewujudkan prinsip ini, yaitu:

- a. Perusahaan dituntut untuk menyiapkan laporan keuangan dengan waktu dan cara yang tepat.
- b. Perusahaan harus melakukan pengembangan pada komite audit dan risiko sebagai pendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh dewan komisaris.
- c. Perusahaan harus melakukan pengembangan dan perumusan kembali pada peran dan fungsi auditor internal.
- d. Perusahaan harus menggunakan jasa auditor eksternal yang profesional.

3. *Responsibility*

Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian atau kepatuhan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku yang dimaksud termasuk yang berkaitan dengan masalah hubungan industrial, masalah pajak, masalah perlindungan lingkungan hidup, masalah standar penggajian dan masalah kesehatan/keselamatan kerja.

4. *Independency*

Berdasarkan KNKG pada buku pedoman umum GCG, (2006) independensi merupakan salah satu prinsip pada *Good Corporate Governance* yang mewajibkan perusahaan harus dikelola secara independen dan professional sehingga setiap organ yang ada di dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan mengintervensi divisi lain.

5. *Fairness*

Didefinisikan sebagai perlakuan adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang muncul berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta perjanjian terhadap stakeholder.

Fairness diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). Dengan adanya prinsip *fairness* diharapkan dapat memberi perlindungan kepada perusahaan. Dengan kata lain, *fairness* menjadi mata dalam memantau dan menjamin perlakuan adil di antara bermacam-macam kepentingan di dalam sebuah perusahaan.

C. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Komite Nasional bagi Pengelola Perusahaan yang Baik, manfaat GCG adalah:

Manfaat Bagi Perusahaan

1. Alokasi sumber daya secara efisien
2. Pengembalian keputusan secara efektif
3. Arah perusahaan yang jelas
4. Peningkatan efisiensi
5. Lingkungan kerja yang kondusif
6. Sumbangan positif
7. Kinerja yang terpercaya

Manfaat Bagi Pemodal Publik

1. Kesetaraan perlakuan
2. Hak-hak terlindungi
3. Penghasilan yang berkesinambungan

D. Pedoman *Good Corporate Governance*

Pada tanggal 29 November 2000 secara resmi (KNKG) atau Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* menetapkan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG). Penyusunan

pedoman tersebut sesuai dengan Keputusan Menko Perekonomian No. 31/M.Ekuin/06/2000. KNKG juga merekomendasikan perbaikan perangkat hukum yang diperlukan untuk menunjang implementasi *code* tersebut, antara lain:

1. Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas untuk mengakomodasi prinsip-prinsip *good corporate governance*.
2. Melakukan perubahan atas Undang-Undang tentang Pendaftaran Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan terhadap informasi perusahaan.
3. Memperbaiki dan meningkatkan standar-standar akunting, termasuk aturan-aturan tentang pembentukan Komite Audit dan Pejabat Kepatuhan (*Compliance Officer*).
4. Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan keterbukaan, memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan pada Pasar Modal, termasuk mendukung terbentuknya *Financial Supervisory Agency* yang baru, sebagai bagian dari undang-undang tetang *Central Bank* yang baru.
5. Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.
6. Memperbaiki dan meningkatkan aturan-aturan pada sektor perbankan.

Menurut Adrian Sutedi (2011:72) adapun sebagai upaya pengembangan kerangka kerja dalam pelaksanaan Pedoman bagi Pengelola Perusahaan yang baik, pihak KNKG telah melakukan beberapa usaha-usaha antara lain:

1. Pedoman bagi Pengelola Perusahaan yang baik telah diajukan kepada pemerintah sebagai inisiatif dari sektor swasta untuk digunakan sebagai acuan dan referensi dalam mengatur berbagai macam sektor-sektor swasta, profesi-profesi penunjang dan bahan pelatihan bagi para manajer.
2. Lembaga pemeringkat independen akan melakukan pemeringkatan kepatuhan perusahaan sebagai bagian dari mekanisme pengontrolan oleh publik.
3. Pedoman bagi Pengelolaan Perusahaan yang baik akan diterapkan seperti halnya standar dalam industri (contohnya ISO 9000).

E. Penjelasan Tata Cara Penilaian/Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN

Menurut SK-16/S.MBU/2012 pengukuran terhadap penerapan GCG dilakukan dalam bentuk:

1. Penilaian (*Assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun.
2. Evaluasi (*Review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya.

Indikator atau parameter penilaian dan evaluasi dalam penerapan GCG pada BUMN dikelompokan dalam 6 (enam) faktor atau aspek yang terdiri dari:

1. Pemegang saham dan RUPS/Pemilik Modal;
2. Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan;
3. Dewan komisaris/dewan pengawas;
4. Direksi;
5. Pengungkapan dan keterbukaan informasi;
6. Faktor lainnya.

Faktor-faktor yang diuji kesesuaian penerapannya dalam suatu parameter atau subindikator ditetapkan atas dasar klasifikasi sebagai berikut:

1. Diseminasi/sosialisasi SOP/kebijakan/aturan main;
2. Keberadaan SOP/Kebijakan/aturan main yang melandasi proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN (pemegang saham/RUPS, dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi) termasuk kelengkapan muatan SOP/Kebijakan/aturan main;
3. Pemahaman para partisipan yang melaksanakan proses;
4. Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/Kebijakan/aturan main;
5. Pelaksanaan proses di organ BUMN sesuai SOP/kebijakan/aturan main;
6. Keluaran atau output atas proses yang dilaksanakan oleh organ BUMN;
7. Kualitas keluaran output yang dihasilkan.

Tabel. 1 Faktor-faktor kesesuaian penerapan GCG

No	Praktik yang diuji	Tingkat Pemenuhan				
		0	0.25	0.50	0.75	1
1.	Keberadaan SOP/kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d 50%) persyaratan	Memenuhi sebagian (>50 s.d 75%) persyaratan	Memenuhi sebagian (>75 s.d 85%) persyaratan	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/kriteria
2.	Diseminasi/Sosialisasi/SOP/ Kebijakan/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d 50%) persyaratan	Memenuhi sebagian (>50 s.d 75%) persyaratan	Memenuhi sebagian (>75 s.d 85%) persyaratan	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/kriteria
3.	Pemahaman para partisipan	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d 50%)	Memenuhi sebagian (>50 s.d 75%)	Memenuhi sebagian (>75 s.d 85%)	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/kriteria

	Yang melaksanakan proses		persyaratan	persyaratan	persyaratan	
4.	Rencana pelaksanaan atas proses sesuai SOP/aturan main	Tidak ada	Memenuhi sebagian kecil (>0 s.d 50%) persyaratan	Memenuhi sebagian (>50 s.d 75%) persyaratan	Memenuhi sebagian (>75 s.d 85%) persyaratan	Memenuhi seluruh (>85%) persyaratan/kriteria

(Sumber : SK-16/S.MBU/2012

Langkah terakhir yang dilakukan, penilai/evaluator menetapkan nilai/skor hasil penilaian/evaluasi penerapan GCG pada BUMN dengan menetapkan klasifikasi kualitas penerapan GCG BUMN, sebagai berikut:

1. Nilai di atas 85 : Sangat Baik
2. $75 < \text{nilai} \leq 85$: Baik
3. $60 < \text{nilai} \leq 75$: Cukup Baik
4. $50 < \text{nilai} \leq 60$: Kurang Baik
5. Nilai ≤ 50 : Tidak Baik

F. Kinerja Perusahaan

“Kinerja pada dasarnya merupakan suatu yang dihasilkan atau hasil kerja yang dicapai suatu perusahaan” (Zarkasyi, 2008:48). Laporan keuangan yang berkualitas baik adalah sarana dasar dalam pengungkapan kondisi operasi bisnis perusahaan dan juga merupakan informasi penting bagi investor, kreditor dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan investasi.

Berdasarkan batasan diatas, maka kinerja perusahaan adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu organisasi dalam periode tertentu dengan mengacu pada standar yang ditetapkan. Kinerja perusahaan hendaknya merupakan hasil yang dapat diukur dan menggambarkan kondisi empirik suatu perusahaan dari berbagai ukuran yang disepakati. Untuk mendapatkan ukuran yang disepakati, kinerja perusahaan bisa dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan. Menurut (Susan Irawati, 2006:25) analisis keuangan dalam rangka evaluasi kinerja diperlukan rasio-rasio keuangan yaitu:

1. Rasio Leverage

Merupakan sebuah rasio yang digunakan sebagai alat ukur sampai dimana besarnya aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa jauh perusahaan menggunakan hutangnya untuk jangka waktu yang panjang.

2. Rasio Likuiditas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman jangka pendeknya pada saat jatuh tempo atau dalam memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan tersebut.

3. Rasio Aktivitas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber dananya.

4. Rasio Penilaian

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai seberapa besar kemampuan manajemen di dalam sebuah perusahaan dalam menciptakan nilai pasar supaya melebihi biaya modalnya.

5. Rasio Profitabilitas

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar tingkat efektifitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

G. Rasio Profitabilitas

“Profitabilitas merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan kebijakan manajemen. Oleh sebab itu, rasio profitabilitas menunjukkan hasil akhir dari kebijakan dan keputusan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas dapat dihitung dengan membagi antara laba dengan modal” (Moeljadi, 2006:73).

Rasio profitabilitas memiliki beberapa jenis rasio di dalamnya yang digunakan sebagai alat ukur seperti *Return on Assets*, *Operating Ratio* dan *Working Ratio*.

1. *Return On Assets*

“*Return on Assets* merupakan sebuah rasio yang digunakan dalam mengukur *net profit* yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Apabila nilai ROA semakin tinggi maka semakin baik pula nilai produktivitas aset dalam mendapatkan keuntungan bersih” (Lestari dan Sugiarto, 2007:196). ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

(Sumber : Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya)

2. *Operating Ratio*

Operating Ratio digunakan untuk mengukur biaya operasional perusahaan per rupiah penjualan, semakin kecil angka OR maka menggambarkan semakin baik juga kinerja perusahaan. Rasio operasi dapat digunakan untuk menentukan efisiensi manajemen perusahaan dengan membandingkan biaya operasional terhadap penjualan bersih

(Morrel, Peter S : 2007). Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Operation Ratio} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100\%$$

(Sumber : Airline Finance)

3. *Working Ratio*

Sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menutup biaya operasi dari pendapatan tahunan (Sunder, S. 2009 : 219). Rasio ini dihitung dengan mengambil jumlah beban tahunan perusahaan (termasuk depresiasi dan biaya yang berhubungan dengan utang) dan membaginya dengan pendapatan kotor

$$\text{Working Ratio} = \frac{\text{Beban Usaha-B.Penyusutan}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100\%$$

tahunan, seperti dibawah ini:

(Sumber : Journal of Financial Economics)

Working ratio yang menunjukkan angka rasio dibawah 1 (satu) berarti bahwa perusahaan mampu menutup biaya operasional, sedangkan angka rasio yang berada diatas 1 (satu) mencerminkan ketidakmampuan perusahaan untuk menutup biaya operasional.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Moelong (2005) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya penelitian perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. Menurut Sugiyono (2010) “penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan dan menjabarkan sebuah keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini dengan menggunakan prosedur ilmiah dalam menjawab masalah secara aktual”.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dokumen dan arsip-arsip di lapangan, baik data internal berupa surat keputusan serta laporan keuangan, maupun data eksternal seperti

jurnal, majalah, file-file di internet dan lain-lain yang berkaitan dengan hal yang diteliti oleh peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengambil data yang berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah, literature dan sumber lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menambahkan beberapa data yang perlu diperjelas dan akan digunakan sebagai pendukung landasan teoritis dalam permasalahan yang peneliti angkat.

Kemudian menggunakan analisis rasio keuangan, yang merupakan salah satu metode analisa untuk mengetahui hubungan pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan rugi laba secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut (Munawir, 2004). Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Mengumpulkan data mengenai bagaimana bentuk dan landasan GCG pada PT Pelindo II diterapkan;
2. Mengumpulkan laporan keuangan PT Pelindo II melalui neraca dan laporan rugi laba pada tahun 2007 sampai dengan 2012;
3. Memproses data yang didapat melalui perbandingan pada teori yang digunakan dan penghitungan analisis rasio keuangan;
4. Menganalisis dan menginterpretasikan hasil penghitungan rasio keuangan dari tahun 2007 sampai dengan 2012;
5. Menyimpulkan bagaimanakah penerapan GCG pada PT Pelindo mempengaruhi kinerja perusahaan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penerapan Good Corporate Governance pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang

Tabel 2. PT Pelindo II (Persero) Cab. Palembang GCG Score

No .	Aspek Penilaian	Tahun 2012			Penjelasan
		Bobot	Nilai	% Capaia n	
1	Komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan	7.00	3.56	50.81	Kurang Baik
2	Pemegang saham dan RUPS/pemilih modal	9.00	7.55	83.93	Baik
3	Dewan Komisaris	35.00	27.22	77.78	Baik
4	Direksi	35.00	31.21	89.18	Sangat Baik
5	Pengungkapan informasi	9.00	6.97	77.47	Baik

	dan transparansi				
6	Aspek lainnya	5.00	0	0	-
	Jumlah Total	100.0 0	81.55 6	-	
	Klasifikasi Kualitas Penerapan GCG				Cukup Baik

(sumber: Data diolah)

Keterangan score:

1. nilai di atas 85: Sangat Baik
2. $75 < \text{nilai} \leq 85$: Baik
3. $60 < \text{nilai} \leq 75$: Cukup Baik
4. $50 < \text{nilai} \leq 60$: Kurang Baik
5. Nilai ≤ 50 : Tidak Baik

Berdasarkan pada indikator keputusan SK-16/S.Mbu/2012 perhitungan pada penerapan *Good Corporate Governance* pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang dengan data terlampir pada lampiran ke 1 (satu) adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian indikator 1} = \frac{3.56}{7.00} \times 100\% \\ = 50.81\%$$

$$\text{Capaian indikator 2} = \frac{7.55}{9.00} \times 100\% \\ = 83.93\%$$

$$\text{Capaian indikator 3} = \frac{27.22}{35.00} \times 100\% \\ = 77.78\%$$

$$\text{Capaian indikator 4} = \frac{31.21}{35.00} \times 100\% \\ = 89.18\%$$

$$\text{Capaian indikator 5} = \frac{6.97}{9.00} \times 100\% \\ = 77.47\% \text{ (Baik)}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, pencapaian dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Pelindo II (Persero) Cabang Palembang dapat dikatakan cukup baik dikarenakan pada setiap bagian aspek penilaian, perusahaan telah melaksanakan ketentuan tata kelola perusahaan yang baik. Akan tetapi pada penilaian indikator pertama, perusahaan dinilai masih belum memenuhi standar yang diinginkan dikarenakan beberapa hal berikut:

1. Pengendalian gratifikasi belum diatur secara khusus hanya dilakukan melalui surat yang disebarluaskan ke unit kantor cabang.
2. Dikarenakan belum menggunakan *white blowing system*, mengakibatkan Perseroan dinilai belum memiliki dan melaksanakan

kebijakan atas pelaporan dugaan penyimpangan.

B. Interpretasi Kinerja Keuangan pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)

Untuk mengetahui perkembangan perusahaan peneliti membutuhkan laporan keuangan dari tahun 2007 sampai dengan 2012 yang digunakan sebagai pembanding perkembangan perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari beberapa sub rasio, yaitu: *Working Ratio, Return on Assets dan Operating Ratio*.

1. Return On Assets

“ROA digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi rasio ini maka produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih semakin baik” (Lestari dan Sugiantoro, 2007 :196). ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

(Sumber : Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya)

Perhitungan ROA pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang dengan data terlampir pada lampiran ke 2 (dua):

$$\begin{aligned} \text{Return on Assets tahun 2007} &= \frac{32.162.689.905}{66.535.894.129} \times 100\% \\ &= 48,338 \% \\ \text{Return on Assets tahun 2008} &= \frac{43.481.458.120}{91.150.785.031} \times 100\% \\ &= 47,702 \% \\ \text{Return on Assets tahun 2009} &= \frac{31.778.423.434}{135.223.295.318} \times 100\% \\ &= 23,500 \% \\ \text{Return on Assets tahun 2010} &= \frac{43.191.892.731}{211.782.756.733} \times 100\% \\ &= 20,394 \% \\ \text{Return on Assets tahun 2011} &= \frac{51.947.839.395}{233.000.874.315} \times 100\% \\ &= 22,295 \% \\ \text{Return on Assets tahun 2012} &= \frac{42.720.030.157}{391.023.235.602} \times 100\% \\ &= 10,925 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan ROA tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva pada perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah baik.

Dimana nilai ROA menunjukkan > 2%, meskipun mengalami penurunan dengan kondisi tahun 2007 (48,338%), tahun 2008 (47,702%), tahun 2009 (23,500%), tahun 2010 (20,394%), tahun 2011 (22,295%) dan tahun 2012 (10,925%).

2. Working Ratio

Kemampuan perusahaan untuk menutupi biaya operasi dari pendapatan tahunan dapat diukur dengan menggunakan working ratio. Apabila rasio ini menunjukkan angka dibawah 1 berarti bahwa perusahaan mampu menutup biaya operasional, sedangkan rasio yang menunjukkan angka diatas 1 menunjukkan perusahaan tidak mampu menutup biaya operasional. *Working ratio* diukur menggunakan rumus (Sunder, S. 1999 : 219):

$$\text{Working Ratio} = \frac{\text{Beban Usaha} - \text{Beban Penyusutan}}{\text{Pendapatan Bersih}}$$

(Sumber : Journal of Financial Economics)

Perhitungan *Working Ratio* pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang dengan data terlampir pada lampiran ke 2 (dua):

$$\begin{aligned} \text{Working Ratio tahun 2007} &= \frac{68.974.751.935 - 4.723.376.632}{102.096.685.046} \\ &= 0,6293 \\ \text{Working Ratio tahun 2008} &= \frac{68.069.836.410 - 5.147.730.974}{112.283.325.354} \\ &= 0,5603 \\ \text{Working Ratio tahun 2009} &= \frac{87.547.515.830 - 5.817.925.430}{119.061.802.850} \\ &= 0,6864 \\ \text{Working Ratio tahun 2010} &= \frac{98.191.342.384 - 8.025.756.444}{134.239.631.570} \\ &= 0,6717 \\ \text{Working Ratio tahun 2011} &= \frac{111.497.176.650 - 8.216.857.043}{158.628.392.869} \\ &= 0,6510 \\ \text{Working Ratio tahun 2012} &= \frac{141.715.769.384 - 121.097.175.411}{174.295.832.885} \\ &= 0,6920 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan *Working Ratio* tersebut di atas menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menutupi biaya operasi yang diperoleh dari pendapatan tahunan pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah baik, dimana nilai *Working Ratio* menunjukkan < 1 dan terlihat stabil dengan kondisi tahun 2007 (0,6293), tahun 2008 (0,5603), tahun 2009 (0,6864), tahun

2010 (0, 6717), tahun 2011 (0, 6510), tahun 2012 (0, 6920).

3. *Operating Ratio*

Operating Ratio digunakan untuk mengukur biaya operasional perusahaan per rupiah penjualan, semakin kecil angka OR maka menggambarkan semakin baik juga kinerja perusahaan. *Operating ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Morrell 2007: 56):

(Sumber : *Airline Finance*)

$$\text{Operating Ratio} = \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{Pendapatan Bersih}} \times 100\%$$

Perhitungan *Operating Ratio* pada PT Pelabuhan Indonesia II Cabang Palembang:

$$\text{Operating Ratio tahun 2007} = \frac{68.947.751.935}{102.096.685.046} \times 100\% \\ = 67,531\%$$

$$\text{Operating Ratio tahun 2008} = \frac{68.069.836.410}{112.283.325.354} \times 100\% \\ = 60,623\%$$

$$\text{Operating Ratio tahun 2009} = \frac{87.547.515.830}{119.061.802.850} \times 100\% \\ = 73,531\%$$

$$\text{Operating Ratio tahun 2010} = \frac{98.191.342.384}{134.239.631.570} \times 100\% \\ = 73,146\%$$

$$\text{Operating Ratio tahun 2011} = \frac{111.497.176.650}{158.628.392.869} \times 100\% \\ = 70,288\%$$

$$\text{Operating Ratio tahun 2012} = \frac{141.715.769.384}{174.295.832.885} \times 100\% \\ = 81,307\%$$

Berdasarkan perhitungan *Operating Ratio* tersebut di atas menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang diperoleh dari mengukur biaya operasi per rupiah tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah baik, meskipun cenderung mengalami penurunan dengan kondisi tahun 2007 (67,531%), tahun 2008 (60,623%), tahun 2009 (73,531%), tahun 2010 (73,146%), tahun 2011 (70,288%) dan tahun 2012 (81,307%). Dilihat dari hasil perhitungan *Return on Assets*, *Working Ratio* dan *Operating Ratio* pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, perusahaan memiliki keuntungan bersih dan kinerja perusahaan yang baik, sehingga perusahaan mampu menutupi biaya operasional mereka dengan baik.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tentang *Good Corporate Governance* pada PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cab. Palembang penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparency*)

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang telah menerapkan keterbukaan dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi informasi mengenai perusahaan dijelaskan secara terinci oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat dengan mudah kita dapatkan melalui media elektronik atau website resmi PT Pelabuhan Indonesia II.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas pada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang diwujudkan dengan kejelasan mengenai tanggungjawab yang mewajibkan semua karyawan melakukan aktivitasnya sesuai dengan job descriptionnya. PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang memberikan informasi serta kebijakan tentang upaya-upaya dalam menerapkan prinsip akuntabilitas atas kompetensi organisasi.

3. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Tanggungjawab atas Laporan Keuangan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Palembang diterapkan dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan berguna bagi para pemangku kepentingan Laporan Keuangan. Laporan Keuangan disusun sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Dalam rangka memenuhi kepatuhan perusahaan terhadap pelaksanaan prinsip Kehati-hatian, PT Pelindo II telah melaporkannya dengan cukup baik. PT Pelindo II juga telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial.

4. Independensi (*Independency*)

Dalam usaha menghindari pengaruh atau tekanan serta benturan kepentingan dari pihak lainnya yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, PT Pelindo II telah membuat sistem pengendalian internal yang memantau setiap proses yang terjadi didalam perusahaan. Perseroan membentuk satuan pengawasan internal yang bertugas mengevaluasi atas system pengendalian internal yang hasilnya nanti oleh Direksi akan

dilaporkan secara periodic kepada Dewan Komisaris.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Pada PT Pelindo II (Persero) Cabang Palembang, Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, dilakukan berdasarkan hasil dari RUPS yang dilaksanakan secara berkala. Setiap pengangkatan dilakukan dengan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan (*fit and proper test*).

Pada laporan keuangan perusahaan yang dianalisis dengan menggunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari *Return on Assets*, *Working Ratio* dan *Operating Ratio*, peneliti membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada ROA (*Return on Assets*), dari tahun 2007-2012 perusahaan memiliki tingkat ROA yang tinggi jauh diatas 2% yang mana apabila tingkat ROA diatas 2% maka perusahaan tersebut memiliki keuntungan bersih semakin baik. Walaupun demikian tingkat ROA perusahaan mulai tahun 2007-2012 terus menurun yang disebabkan biaya operasional yang terus meningkat tanpa diimbangi pendapatan yang besar.
2. Pada WR (*Working Ratio*), perusahaan menunjukkan bahwa mereka telah mampu menutupi biaya operasi mereka.
3. Pada OR (*Operating Ratio*), perusahaan menunjukkan kinerja yang kurang baik dimana tingkat OR pada PT Pelindo II Cabang Palembang terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh beban operasional pada PT Pelindo II Cabang Palembang yang terus meningkat.

B. Saran

Dikarenakan data penelitian ini sebagian besar bersumber melalui data sekunder, untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat melibatkan lebih banyak data dan tahun pengamatannya sehingga lebih memahami konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, dan didukung juga dengan data primer yang banyak dari perusahaan karena semakin lengkap data yang didapat, maka validitas akan lebih terjamin. Saran untuk PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang untuk informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan sudah terlihat rinci dalam pelaporannya namun untuk penyimpanan berkas laporan keuangannya masih belum baik, karena apabila laporan keuangan pada tahun-tahun sebelumnya sewaktu-waktu

dibutuhkan, pihak perusahaan dapat menyiapkannya dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ferlinda ED, Ribawanto H, Siswidiyanto. 2013. *Implementasi Good Corporate Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayan pada PT Telkom Banyuwangi*. Jurnal Universitas Brawijaya. 1(4): 22-30.
- Irawati, Susan. 2006. *Manajemen Keuangan*. Cetakan Kesatu. Bandung: PT.Pustaka
- Moeljadi. 2006. *Manajemen Keuangan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*, BPFE : Yogyakarta.
- Moelong, Lexi J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Morrell, Petter S. *Airline Finance*. Hampshire : Ashgate Publishing Limited. 2007
- Munawir S, S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Liberty.
- Peraturan Kementerian Badan Usaha Milik Negara KEP 117/M-MBU/2002. *Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfa Beta.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*, Jakarta: Sinar Grafika.